

ANALISIS SWOT STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG

Eka Nurcahya¹, Mohammad Benny Alexandri²

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: ekanurcahya@gmail.com

ABSTRAK

Bagaimanakah strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kota Bandung apabila dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) agar mampu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah di Kota Bandung? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah menyadari bahwa intinya bukan soal besar kecilnya tetapi bagaimana cara menanggulangi orang miskin adalah lebih penting. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan berbagai program, misalnya bidang pendidikan, pekerjaan, layanan perumahan, partisipasi masyarakat. Pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun Peraturan Daerah (PERDA), aplikasinya perlu pengawasan dan disusun program yang lebih praktis.

Kata Kunci : *Strategi, Penanggulangan Kemiskinan, SWOT, Kota Bandung*

PENDAHULUAN

Kota Bandung memiliki 400 ribu penduduk atau sekitar 79 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masih hidup dalam kemiskinan. Meski begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengklaim angka yang didapat pada tahun 2018 tersebut, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Persentase keluarga miskin di Kota Bandung yang memiliki anggota keluarga 2-3 orang yang cukup besar yakni dengan besaran persentase 61,9% . Sedangkan mereka yang beranggota

keluarga antara 5-8 orang sebesar 35,9%. Pemenuhan kebutuhan pangan keluarga miskin di Kota Bandung rata-rata memiliki frekuensi makannya 2 kali dalam sehari, tetapi belum mengkonsumsi makanan secara lengkap yaitu nasi, sayur, lauk pauk. (Naskah Akademik, 2018, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penanggulangan Kemiskinan, Team STKS Bandung) Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic*

needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2014-2018. Ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2014-2018.

TAHUN	Jml Penduduk Miskin (Dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2014	115.00	4.65	0.69	0.17	353,423
2015	114.12	4.61	0.72	0.19	376,311
2016	107.58	4.32	0.55	0.12	400,541
2017	103.98	4.17	0.68	0.18	420,579
2018	89.38	3.57	0.48	0.11	448.902

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 Kota Bandung dalam Angka Kota Bandung)

Pada tahun 2018 lalu, angka kemiskinan di Kota Bandung berada di 3,57 persen. Saat ini, jumlah warga miskin dan sangat miskin di Kota Bandung sebanyak 79.000 Kepala Keluarga atau 400.000 jiwa.

Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2020 berencana akan membuat Peraturan Daerah. Dalam menjalankan program penganggulangan kemiskinan, pemerintah mengapresiasi seluruh mitra kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Strategi yang telah dilakukan adalah unsur yang harus dirangkul agar kemiskinan bisa teratasi. Kemiskinan, menurut Wakil

Walikota Kota Bandung, Yana Mulyana, merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah baik dari pusat sampai daerah. "Maka dari itu, eksistensi pemerintah punya tupoksi, pemerintah yang eksis berupaya agar masyarakat sejahtera dan bahagia, targetnya, pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung tinggal 3,14 persen." (<https://jabar.tribunnews.com/2019/11/13/tangani-masalah-kemiskinan-wakil-wali-kota-minta-skipd-petakan-warga-miskin-di-kota-bandung>).

Kota Bandung saat ini sudah memiliki Basis Data Terpadu (BDT) yang dipegang oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung.

Pemerintah mengimbau agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur kewilayahan di Kota Bandung dapat memetakan kondisi kemiskinan warga Kota Bandung di wilayahnya masing-masing, serta mengklasifikasi permasalahan yang dihadapi oleh setiap warga miskin.

Pemerintah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, menyelaraskan program yang sesuai sehingga terintegrasi secara tepat. Program penanganan kemiskinan itu ada di pusat, provinsi, dan Bapedda serta Bappenas. Semua tertampung di BDT, agar *treatment*-nya kena atau tepat sasaran, harus adanya peta penyebaran penduduk miskin yang jelas dan klasifikasi penyebabnya, bahkan hingga ke tingkat kecamatan. Strategi Pemerintah Kota Bandung di antaranya adalah Program Inovasi Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), Dana Kelurahan (bantuan pemerintah pusat), dan Kotaku. Menurut Yana Mulyana, bila ada penduduk yang terkategori sangat miskin dikarenakan dia harus berobat cuci darah terus menerus, maka menjadi sangat miskin. Kalau penanganannya masalahnya diberi beras, itu kan bukan solusi, karena dia butuh solusi lain untuk kesehatan agar meringankan masalahnya. Selain SKPD, komunitas juga ikut serta. Hal seperti ini perlu kita beri ruang karena sesuai misi kelima yakni partisipasi dan pembiayaan non

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat utama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang diangkat adalah, “Bagaimanakah strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kota Bandung apabila dianalisis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) agar mampu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah di Kota Bandung? Dalam rangka menjawab perumusan masalah di atas, maka penelitian ini menggunakan kajian literatur kemiskinan dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pihak pemerintah Kota Bandung dalam penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan strategis.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) suatu perusahaan (Kotler & Armstrong 2008:64). Atau dengan kata lain, S-W-O-T digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi (Hartono 2005:46). Menurut (David

2006:8) semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk tujuan dan penetapan strategi suatu organisasi. Jadi, analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi, dalam konteks artikel ini ditujukan untuk menilai kualitas layanan pemerintah daerah, sehingga diharapkan mampu meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu pemerintah daerah serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

Garis Kemiskinan

Badan Pusat Statistik Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Badan Pusat Statistik Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain lain).

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa

dimensi penyebab kemiskinan (Cox 2004 ; 1-6), yaitu:

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.
3. Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan

kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi

4. Kemiskinan konsekuensial. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

Indikator Kemiskinan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas (Harniati, 2010). Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah :

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan

dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahal biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.

3. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahal biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
5. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
6. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.

7. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.
8. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumberdaya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.
9. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.
10. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
11. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

Pendekatan Demokrasi Sosial.

Pendekatan ini menekankan pada cara yang dilakukan individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada

kapabilitas individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Salah satunya teori yang mendukung paradigma keberfungsian sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Baker, Dubois, dan Miley (1992). Teori tersebut menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini individu dianggap sebagai subyek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya. Sehingga setiap individu memiliki dan atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada disekitar dirinya. (Edi Suharto 2009)

Pendekatan Kebijakan di Bidang Sosial dan Kesejahteraan

Formulasi kebijakan di bidang sosial dan kesejahteraan mencakup pertanyaan : (1) Bagaimana sumberdaya dikumpulkan? termasuk di dalamnya adalah dari mana sumber pendapatan negara untuk menjamin kelangsungan kebijakan kesejahteraan sosial : pajak apa saja, berapa besar pajak dan sebagainya. (2) bagaimana aset untuk memfasilitasi kesejahteraan sosial didistribusikan? peran apa saja yang harus dilakukan oleh negara, pasar, keluarga bahkan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak? (Mudiyono, 2002)

Penyebab Kemiskinan

Menurut Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998;176), kemiskinan dari sisi neo liberal dan demokrasi sosial :

Sisi Neo Liberal : Kelemahan dan pilihan- pilihan lemahnya pendapatan, kepribadian pasrah, bodoh individu, pengaturan lemahnya (malas, pasrah, bodoh)

Sisi Demokrasi Sosial : Ketimpangan struktur ekonomi dan politik, ketidakadilan sosial. (Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998;176)

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Neo Liberal

- a. Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif
- b. Memberi pelatihan keterampilan pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Demokrasi Sosial

- a. Penyaluran pendapatan dasar secara universal
- b. Perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi Negara dan kebijakan sosial (Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998;176)

METODE PENELITIAN

Metoda penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara

aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan di waktu mendatang (Suyanto & Sutinah 2006).

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif hanyalah menguraikan tanggapan terhadap situasi atau peristiwa, sehingga tidak menjelaskan hubungan kausalitas maupun melakukan uji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur dan menggunakan data sekunder.

Teknik analisis data dengan menggunakan SWOT Analisis yaitu mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dari berbagai informasi untuk menemukan tujuan penelitian ini. Penggunaan analisis SWOT karena merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi, baik bagi perusahaan maupun pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kekuatan

1. Pemeintah Kota Bandung telah menyiapkan berbagai program seperti, Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan, program jaminan sosial kesehatan melalui UHC (*Universal Health Coverage*), program Bantuan pendidikan

bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan, program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan bantuan bantuan pangan melalui penyediaan bantuan beras bagi warga tidak mampu.

2. Pemerintah Kota Bandung berencana membuat PERDA mengenai penanganan kemiskinan. Sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, RAPERDA bertujuan untuk pemerintah dalam memberikan pelayanan optimal, terencana, sistematis, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kelemahan

1. RAPERDA yang disusun perlu diturunkan dalam bentuk program yang lebih praktis dengan basis sumber pendanaan yang tepat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat tarik menarik bagi SKPD untuk bertindak sebagai dinas yang bertanggungjawab.
2. Kesadaran dan kepedulian masyarakat belum terbentuk, perlu digali lagi ajakan berpartisipasi dengan didasarkan pada Budaya Sunda dan agama.

Analisis Peluang

1. Sudah saatnya Pemkot Bandung memiliki PERDA (Peraturan Daerah) tentang penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan pelayanan kepada penduduk miskin dan juga sebagai

landasan hukum dalam melakukan pelayanan secara terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan.

2. RAPERDA Penanggulangan Kemiskinan ditujukan kepada penduduk miskin di Kota Bandung, dimana ruang lingkup dan jangkauan kegiatannya meliputi perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta partisipasi masyarakat.
3. Arah penyelenggaraan RAPERDA Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga masyarakat miskin Kota Bandung agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya. (Lembaran Kota tahun 2020 nomor 2 perihal usul Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan).
4. Kontribusi dan partisipasi masyarakat perlu dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam programnya.
5. Aplikasi LAPOR! telah dimanfaatkan oleh masyarakat, antisipasi Dinas untuk menangani laporan masyarakat secara cepat dan tepat perlu diapresiasi dan ditingkatkan.

Analisis Ancaman

1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun PERDA, aplikasinya perlu pengawasan dan disusun program yang lebih praktis.

2. Pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak.
3. RAPERDA Penanggulangan Kemiskinan ditujukan kepada penduduk miskin di Kota Bandung, dimana ruang lingkup dan jangkauan kegiatannya meliputi perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta partisipasi masyarakat.

Implikasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung

NO	Indikator Kemiskinan	Implikasi di Kota Bandung
1	Keterbatasan pangan	Bantuan Pangan Non Tunai.
2	Keterbatasan akses kesehatan	program jaminan sosial kesehatan melalui UHC (<i>Universal Health Coverage</i>)
3	Keterbatasan akses pendidikan	program Bantuan pendidikan bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan.
4	Keterbatasan akses pada pekerjaan	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
5	Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi	Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu)
6	Keterbatasan akses untuk partisipasi	Aplikasi LAPOR! telah dimanfaatkan oleh masyarakat, antisipasi Dinas untuk menangani laporan masyarakat secara cepat dan tepat perlu diapresiasi dan ditingkatkan.

Untuk mempelajari kemiskinan, pendekatan keberfungsian sosial menekankan pada empat point yaitu (Edi Suharto 2009):

1. Kemiskinan sebaiknya dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya. Pada point pertama ini juga termasuk efektivitas jaringan sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya, dimana jaringan sosial yang dimaksud termasuk pula lembaga kemasyarakatan dan program-program anti kemiskinan setempat.
2. Menggunakan indikator komposit untuk mengukur kemiskinan, dengan unit analisis keluarga atau

rumah tangga dan jaringan sosial yang ada disekitarnya

3. Lebih menekankan pada konsep kemampuan sosial dari pada hanya pada konsep pendapatan dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan
4. Kemampuan sosial keluarga miskin difokuskan pada beberapa indikator kunci, yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola asset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan

dalam menghadapi goncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*). Sedangkan indikator kunci untuk mengukur tingkat sosial mencakup kemampuan lembaga-lembaga sosial memperoleh sumber daya (SDM dan finansial), menjalankan peran atau fungsi utamanya, mengelola asset, menjangkau sumber, berpartisipasi dalam program anti-kemiskinan, dan peran dalam menghadapi goncangan dan tekanan sosial.

KESIMPULAN

Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Bandung diterapkan dengan target Pemerintah Kota Bandung sebesar (angka kemiskinan) 3,14% pada 2023. Secara persentase jumlah masyarakat miskin kecil, tapi secara jumlah pasti besar. Pemerintah menyadari bahwa intinya bukan soal besar kecilnya tetapi bagaimana cara menanggulangi orang miskin adalah lebih penting. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan berbagai program, misalnya bidang pendidikan, pekerjaan, layanan perumahan, partisipasi masyarakat.

Pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) telah menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun PERDA, aplikasinya perlu

pengawasan dan disusun program yang lebih praktis.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diambil kebijakan pembangunan yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan, yang antar lain meliputi:

- a) Optimalisasi pemanfaatan APBD
- b) Penajaman program-program
- c) Pengarahan dana pinjaman dan hibah
- d) Sinkronisasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
- e) Pelibatan Pentahelix

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2015) *Kota Bandung dalam Angka Kota Bandung*.
- Badan Pusat Statistik (2019) *Kota Bandung dalam Angka Kota Bandung*.
- Bappenas, (2002) *Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan*
- Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998;176) *Social Policy in Aotearoa New Zealand: a Critical Introduction*, Duckland, Oxford University Press
- Cox 2004 ; 1-6, Demo, D.H., & Cox, M.J. (2000). *Families and young children: A review of research in the 1990s*. *Journal of Marriage and the Family*, 62, 876–895.

- Dubois, B. dan Miley, K.K. (1992) *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon
- Hartono, Jogiyanto. (2005) *Sistem informasi strategik untuk keunggulan kompetitif*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. (2008) *Prinsip-prinsip pemasaran* jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mudiyono (2002) *Jaminan Sosial di Indonesia : Relevansi Pendekatan Informal*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN 1410-4946, Volume 6, Nomor 1, Juli 2002
- Naskah Akademik, (2018) *Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penanggulangan Kemiskinan*, Team STKS Bandung
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Surat Keputusan Walikota Bandung dengan Nomor 460/Kep.5.11-BKPM/2014. Tentang Pembentukan Tim Fasilitas Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Kencana Persada.
- Immanuel Adhitya Wulanata Christmastianto (2017) *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 20 No. 1, April 2017 ISSN 1979 – 6471

Internet

- <https://jabar.tribunnews.com/2019/11/13/tangani-masalah-kemiskinan-wakil-wali-kota-minta-skipd-petakan-warga-miskin-di-kota-bandung?page=2>
- <https://www.ayobandung.com/read/2019/11/13/70110/pemkot-bandung-targetkan-angka-kemiskinan-314-pada-2023>